

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI  
TINDAK PIDANA PEMBALAKAN LIAR**

**(Studi Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk**

**Nomor : 149/Pid.B.LH/2018/PN.Njk.)**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Nadya Devi Trisna**

**NIM. C03216035**



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel**

**Fakultas Syari'ah dan Hukum**

**Jurusan Hukum Publik Islam**

**Prodi Hukum Pidana Islam**

**Surabaya**

**2020**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : Nadya Devi Trisna  
NIM : C03216035  
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Publik Islam/  
Hukum Pidana Islam  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi  
Tindak Pidana Pembalakan Liar (Studi Putusan  
Pengadilan Negeri Nganjuk  
Nomor: 149/Pid.B.LH/2018)/PN.Njk.)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 20 April 2020

Saya yang menyatakan,



Nadya Devi Trisna

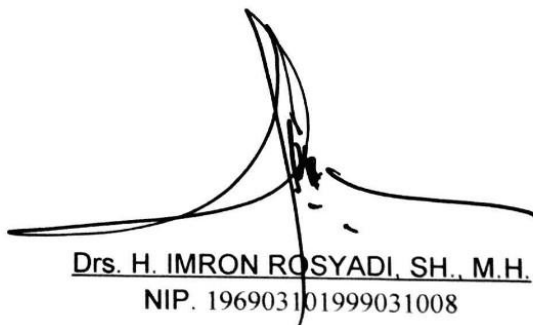
NIM. C03216035

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Nadya Devi Trisna NIM. C03216035 telah diperiksa dan disetujui untuk di munaqasahkan

Surabaya, 20 April 2020

Pembimbing,



Drs. H. IMRON ROSYADI, SH., M.H.  
NIP. 196903101999031008

## PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi yang ditulis oleh Nadya Devi Trisna NIM. C03216035 telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, tanggal 12 Mei 2020, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Hukum Pidana Islam.

### Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,



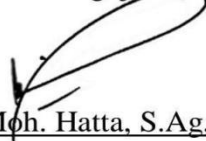
Drs. H. Imron Rosyadi, SH., M.H.  
NIP. 196903101999031008

Penguji II,



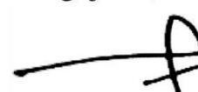
Dr. H. Abd. Basith Junaidy, M.Ag.  
NIP. 197110212001121002

Penguji III,



Moh. Hatta, S.Ag, MHI.  
NIP. 197110262007011012

Penguji IV,



Agus Solikin, S.Pd., M.S.I  
NIP. 198608162015031003

Surabaya, 22 Mei 2020

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. H. Masruhan, M.Ag.

NIP. 195904041988031003



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail:  
perpusuinsby.ac.id

---

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : NADYA DEVI TRISNA  
NIM : C03216035  
Fakultas/Jurusan : SYARIAH DAN HUKUM / HUKUM PIDANA ISLAM  
E-mail address : [nadyatrisna8@gmail.com](mailto:nadyatrisna8@gmail.com)

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI TINDAK  
PIDANA PEMBALAKAN LIAR (Studi Putusan Pengadilan Negeri  
Nganjuk Nomor : 149/Pid.B.LH/2018/PN.Njk.)**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 23 Mei 2020  
Penulis

(NADYA DEVI TRISNA)

## ABSTRAK

Skripsi dengan judul Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Pembalakan Liar (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor : 149/Pid.B.LH/2018/PN.Njk ini di tulis untuk menjawab pertanyaan yang di tuangkan dalam 2 (dua) rumusan masalah yaitu: (1) Bagaimana pertimbangan hakim terhadap sanksi tindak pidana pembalakan liar dalam Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor : 149/Pid.B.LH/2018/PN.Njk, dan (2) Bagaimana tinjauan hukum pidana islam terhadap sanksi tindak pidana pembalakan liar dalam Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor : 149/Pid.B.LH/2018/PN.Njk.

Dalam penelitian ini dihimpun dari koleksi data. Data yang di kumpulkan adalah data yang berkaitan dengan tindak pidana pembalakan liar yakni berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Setelah data terkumpul, data di analisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif dengan pola pikir deduktif dengan tipe penelitian studi *dogmatic* atau penelitian doktrinal.

Hasil penelitian ini menunjukkan 2 (dua) kesimpulan yaitu: (1) Pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor : 149/Pid.B.LH/2018/PN.Njk. Setelah hakim memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh penuntut umum, dan mempertimbangkan fakta-fakta hukum serta hal yang meringankan dan hal yang memberatkan serta mempertimbangkan unsur-unsur dalam Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, sudah terpenuhi. Maka majelis hakim menjatuhkan hukuman berupa pidana penjara 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Dalam hal ini penjatuhan hukuman oleh hakim dalam putusan tersebut di bawah minimal ketentuan perundang-undangan tersebut. Sedangkan dalam pasal tersebut hukuman denda minimal Rp.500.000.000,00 (lima ratus ribu rupiah). (2) Berdasarkan tinjauan hukum pidana Islam bahwa tindak pidana pembalakan liar tersebut merupakan jarimah takzir yang berkaitan dengan harta sehingga sanksi di tentukan oleh ulil amri, dalam bentuk hukuman seperti hukuman kawalan atau hukuman penjara dan hukuman yang berkaitan dengan harta yaitu membayar (ganti rugi atau denda).

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka ada saran yang perlu dicantumkan yakni untuk para penegak hukum terutama hakim, alangkah lebih baiknya dalam mempertimbangkan suatu perkara diharapkan agar lebih kritis dan bijaksana dalam memberantas tindak pidana pembalakan liar dalam memberikan hukuman yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 untuk memberikan keadilan dan pencegahan kepada masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana pembalakan liar. Kemudian untuk masyarakat lainnya diharapkan dapat menjaga kelestarian yang telah Allah berikan kepada kita semua yang akan bermanfaat untuk masa yang mendatang.

## DAFTAR ISI

Halaman	
SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
MOTTO.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Kajian Pustaka.....	7
E. Tujuan Penelitian .....	10
F. Kegunaan Hasil Penelitian.....	10
G. Definisi Operasional.....	11
H. Metode Penulisan.....	12
I. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB II <i>JARIMAH TAKZIR DAN TINDAK PIDANA PEMBALAKAN LIAR DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM</i> .....	18
A. JARIMAH TAKZIR .....	18
1. Pengertian Tindak Pidana Jarimah.....	18
2. Pengertian Jarimah Takzir.....	20
3. Dasar Hukum Takzir.....	21
4. Unsur-unsur Takzir.....	22
5. Macam-macam Sanksi Jarimah Takzir.....	25
6. Tujuan dan Syarat Takzir.....	29
B. Pidana Pembalakan Liar dalam Hukum Positif.....	30
1. Pengertian pembalakan liar.....	30
2. Dasar Hukum Pembalakan Liar.....	34







pengatur tata air tanah, mencegah erosi banjir, menjaga kesuburan tanah dan sebagai wilayah untuk melestarikan keanekaragaman hayati.<sup>4</sup>

Namun potensi alam ini juga sangat menarik minat pengusaha untuk menggali kekayaan yang ada hutan. Kayu-kayu tropis bagaikan emas hijau kecoklatan itu terus-menerus menjadi incaran para pengusaha hutan sebagai produk yang sangat menguntungkan di pasaran dunia. Bahkan masyarakat juga ikut memanfaatkannya padahal sudah ada ketentuan harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tapi masih tetap tidak dihiraukan. Oleh karena itu, hutan secara perlahan namun pasti akan mengalami kerusakan dan menyusut keberadaannya apabila kawasannya dirambah kemudian pepohonan terus ditebang, dan tidak cepat dilakukan penanaman kembali.

Penyebab rusaknya hutan di Indonesia pada prinsipnya yaitu dilakukan oleh berbagai faktor yang sebagian besar dikarenakan oleh aktivitas manusia, antara lain yakni pencurian kayu, penebangan liar dan sebagian lainnya di karenakan bencana alam misalnya kebakaran hutan.<sup>5</sup>

Terdapat sebuah kasus yang terjadi di Nganjuk yaitu sebuah tindak pidana pembalakan liar tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa yakni mengambil sisa-sisa kayu hasil tebangan orang dan memotong/menebang 7 (tujuh) batang tunggak pohon jati lalu

<sup>4</sup> P.Julius F.Nagel, *Pelestarian Hutan Dalam Hubungan Dengan Lingkungan Dan Potensi Ekonomi* Jurnal PESAT Vol. 4, 2011, 12.

<sup>5</sup> Indriyanto, *Pengantar Budi Daya Hutan...*, 4.

mengangkutnya dengan volume 0,155 M<sup>3</sup> dan terdakwa bertempat tinggal di sekitar kawasan hutan.

Pembalakan liar yaitu kegiatan penebangan, pengangkutan dan penjualan kayu yang merupakan bentuk ancaman faktual yang tidak sah atau tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>6</sup>

Dalam pasal 82 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 berbunyi: dalam hal tindak pidana sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin dari yang berwenang yang dilakukan oleh perseorangan yang bertempat tinggal di sekitar kawasan hutan, pelaku di pidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Dalam perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa (Suprianto Bin Sumadi), Majelis Hakim memutuskan terdakwa dihukum dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp.250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah). Namun menurut penulis, pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana denda dirasa kurang tepat, dikarenakan hakim dalam memutuskan denda di bawah minimum dan tidak sesuai dengan ketentuan ancaman denda pada pasal yang digunakan.

<sup>6</sup>Ahmad Redi,”*Hukum Sumber Daya Alam Dalam Sektor Kehutanan*” (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 240.

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ  
يَرْجِعُونَ (٤١)

Kemudian dalam Alquran surah Al- A'raf ayat 56 :

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَعْمًا ۖ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ  
مِّنَ الْحَسِنِينَ (٥٦)

[illegible]

akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.<sup>8</sup>

Dari ayat tersebut di atas telah jelas bahwa Allah Swt telah melarang kita semua yang tinggal di bumi ini untuk merusak alam. Yang ada hanyalah akan menimbulkan bencana bagi diri sendiri dan berdampak pada kerusakan yang akan berakibat kepada lingkungan.<sup>9</sup>

Dalam hukum Islam, terhadap sanksi tindak pidana pembalakan liar ini termasuk kategori jarimah *takzir*. Pengertian *takzir* menurut bahasa ialah memberi pelajaran. Secara ringkas takzir adalah hukuman yang belum ditentukan oleh *syarak*, melainkan diserahkan kepada ulil amri, baik penentuannya maupun pelaksanaannya.<sup>10</sup>

Berdasarkan pemaparan di atas, maka Penulis menemukan keunikan untuk diteliti tentang kasus pembalakan liar dengan judul skripsi **“Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Pembalakan Liar (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor : 149/Pid.B.LH/2018/PN.Njk).”**

### B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

### 1. Identifikasi masalah

Berdasarkan dari uraian di latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasi beberapa masalah yang timbul sebagai berikut :

<sup>8</sup> Ibid., 157.

<sup>9</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* Volume 10, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 405.

<sup>10</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah* ( Jakarta : Sinar Grafika, 2004), 19.

- Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka penulis membatasi ruang lingkup permasalahan yang akan diteliti dan dikaji yaitu sebagai berikut:

- ### C. Rumusan Masalah



2. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Zubair mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2012 yang berjudul “Pembuktian Tindak Pidana Pembalakan Liar (Illegal Logging) oleh Penuntut Umum (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Janeponto)”. Inti dari skripsi ini ialah ketentuan hukum acara pembuktian terhadap tindak pidana penebangan liar, pelaksanaan hukum acara dan pandangan hukum islam terhadap tindak pidana penebangan liar. Sedangkan penulis mengkaji mengenai sanksi yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana pembalakan liar yang tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.<sup>12</sup>

<sup>11</sup> Yofik Aprianto, "Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Putusan Nomor: 243/Pid.Sus/2014/PN.Sbg tentang Illegal Logging di Tapanuli Tengah" (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2017)

[illegible]



4. Skripsi yang ditulis oleh Zahrotun Nazia mahasiswi Universitas Jember, 2013 yang berjudul “Kajian Yuridis Mengenai Illegal Logging di Kawasan Hutan (Study Kasus Illegal Logging di Balai Taman Nasional Meru Betiri Kabupaten Jember)”.Inti dari skripsi ini berisi tentang faktor utama yang sangat mempengaruhi terjadinya illegal logging dan upaya untuk mengatasi kerusakan hutan atau illegal logging yang sudah dilakukan Pemerintah khususnya Balai Taman Nasional Meru Betiri sudah sesuai dengan

[illegible]

Selubungan dengan rumusan masalah tersebut, maka skripsi ini ditulis:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap sanksi tindak pidana pembalakan liar dalam putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor : 149/Pid.B.LH/2018/PN.Njk.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum pidana islam terhadap sanksi tindak pidana pembalakan liar dalam Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor : 149/Pid.B.LH/2018/PN.Njk.

Untuk mempermudah pemahaman dan menghindari salah paham terhadap masalah yang dibahas, dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu membawa beberapa manfaat sebagai berikut :

[illegible]





Berdasarkan judul dan rumusan masalah dalam penulisan penelitian ini, maka data yang dikumpulkan dalam penelitian ini ialah buku-buku hukum, jurnal, dan literatur yang berkaitan dengan objek penelitian.

Sumber data penelitian ini berasal dari data primer dan data sekunder.

- <sup>20</sup> Wirano Surakhmad, *Pengantar Penelitian: Dasar, Metode, Teknik* (Bandung 1994), 25.

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- ## 5. Teknik pengolahan data

- a. *Editing*, yaitu memeriksa kembali data-data yang diperoleh sehingga jelas dan dapat menghasilkan sumber data yang valid.
- b. *Organizing*, yaitu menyusun dan mensistematikan data-data yang penulis peroleh dalam suatu kerangka paparan untuk melengkapi seluruh data mengenai tindak pidana pembalakan liar dalam Putusan Nomor : 149/Pid.B.LH/2018/PN.Njk.

- c. *Analyzing*, yaitu melakukan analisis sejumlah data dengan menganalisa mengenai pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan hukuman tindak pidana pembalakan liar dalam Putusan Nomor : 149/Pid.B.LH/2018/PN.Njk.

Teknik analisa data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis dengan menggunakan pola pikir deduksi, yaitu menggambarkan objek dalam penelitian tentang efektivitas sanksi bagi

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini terdiri dari lima bab, yang selanjutnya terdiri dari sub-sub bab yang masing-masing mempunyai hubungan dengan yang lain dan merupakan rangkaian yang berkaitan, sehingga dapat diketahui kerangka skripsi ini adalah sebagai berikut:

**Bab kedua**, membahas tentang landasan teori mengenai jarimah *takzir* dan tindak pembalikan liar menurut hukum positif dan hukum pidana islam.

[illegible]





**JARIMAH TAKZIR DAN TINDAK PIDANA PEMBALAKAN LIAR**

**DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM**

## 1. Pengertian Tindak Pidana Jarimah

<sup>21</sup> Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), 1.  
<sup>22</sup> A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (upaya menanggulangi dalam islam)* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), 167.  
<sup>23</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1993), 1.







c. Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abi Burdah yang artinya “ Dari Abu Burdah Al-Anshari ra. Bahwa ia mendengar Rasulullah Saw. Bersabda : Tidak boleh dijilid di atas sepuluh cambuk kecuali di dalam hukuman yang telah ditentukan oleh Allah Ta’ala.<sup>30</sup>

Dari ketiga hadis tersebut menjelaskan tentang eksistensi *takzir* dalam syariat islam. Hadis pertama menjelaskan tentang tindakan Nabi yang menahan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana dengan tujuan penyelidikan. Hadis kedua mengatur tentang melaksanakan hukuman *takzir* yang bisa berbeda terhadap satu pelaku dengan yang lainnya, tergantung kepada mereka dan kondisi lain yang menyertainya. Dan hadis yang terakhir ketiga membahas tentang batas hukuman *takzir* yang tidak boleh lebih dari sepuluh kali cambukan, untuk membedakan dengan *jarimah hudud*.<sup>31</sup>

#### 4. Unsur-unsur *Takzir*

Suatu perbuatan dianggap sebagai tindak pidana bilamana unsur-unsurnya telah terpenuhi. Unsur-unsur ini terbagi menjadi dua, yaitu umum dan khusus. Unsur umum ialah unsur yang tentu dianggap berlaku pada semua *jarimah*, sedangkan unsur khusus adalah unsur yang hanya berlaku untuk masing-masing *jarimah* dan berbeda antara *jarimah* satu dengan yang lain.<sup>32</sup> Unsur-unsur umum *jarimah* yaitu:

<sup>30</sup> Ibid., 252.

<sup>31</sup> Ibid., 253.

<sup>32</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah...*, 27.

- a. Unsur formal, yaitu adanya ketentuan atau nash yang menunjukkan sebagai *jarimah*. *Jarimah* tidak akan terjadi apabila belum dinyatakan dalam nash. Untuk *jarimahtakzir*, harus ada peraturan dan undang-undang yang dibuat oleh penguasa.
- b. Unsur materiil, yaitu adanya perilaku yang membentuk *jarimah* atau perbuatan melawan hukum yang benar telah dilakukan.
- c. Unsur moral, yaitu adanya niat dari pelaku untuk berbuat *jarimah*. Unsur ini menyangkut tanggung jawab pidana yang hanya dikenakan orang yang balig, ikhtiar (berkebebasan berbuat), sehat akal.<sup>33</sup>

## 5. Macam-macam Sanksi *Jarimah Takzir*

Dalam pembahasan yang lalu telah dikemukakan bahwa *takzir* ialah hukuman yang belum ditetapkan oleh *syarak* dan diserahkan kepada ulil amri untuk menetapkan. Secara garis besar *takzir* dikelompokkan menjadi empat kelompok yang pertama, hukuman *takzir* yang mengenai badan, contohnya hukuman mati dan *jilid* (dera), yang kedua hukuman yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, contohnya hukuman penjara dan pengasingan, yang ketiga hukuman *takzir* yang berkaitan dengan harta, contohnya denda, perampasan harta, dan yang keempat hukuman-hukuman lain yang ditentukan oleh ulil amri demi kemaslahatan umum.

- a. Hukuman *Takzir* yang Berkaitan dengan Badan

<sup>33</sup> Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah) dengan Kajian Hukum Pidana Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 75.







## 2) Hukuman Pengasingan

c. Hukuman *takzir* yang berkaitan dengan harta

[illegible]

- 1) Menghancurkan harta yang mengarah kepada hal-hal yang bersifat mungkar seperti contoh penghancuran minuman keras atau botol sisa yang dikoleksi.
- 2) Mengubah harta pelaku yang bersifat mungkar dijadikan aksesoris rumah.
- 3) Memiliki harta atau barang berharga pelaku namun telah disetujui oleh hakim.

Terdapat hukuman-hukuman takzir yang lain adalah sebagai berikut :<sup>38</sup>

Peringatan keras macam ini dianggap sebagai hukuman yang lebih ringan. Hal ini dilakukan karena hakim memandang bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tidak terlalu bahaya.

<sup>38</sup> Ibid., 268.

2) Di hadirkan di hadapan sidang

Pemanggilan pelaku kedepan muka sidang untuk diberi peringatan keras. Isi peringatan itu misalnya sama dengan yang dikemukakan di atas, tetapi langsung diucapkan oleh hakim, di sertai dengan muka masam apabila pelaku membandel atau perbuatannya cukup membahayakan.

### 3) Nasihat

Hukum nasihat ini, seperti hukuman peringatan dan dihadirkan di muka sidang, merupakan hukuman yang diterapkan untuk pelaku pemula yang melakukan tindak pidana, bukan karena kebiasaan tapi karena kelalaian

#### 4) Celaan

Imam Al-Mawardi mengemukakan bahwa celaan bisa dilakukan oleh hakim dengan cara memalingkan muka dari hadapan terdakwa. Bisa juga dilakukan dengan berbagai cara dan berbagai perkataan yang diperkirakan dapat mencegah pelaku dari perbuatan pidana yang pernah dilakukannya.

## 5) Pengucilan

Adapun yang dimaksud pengucilan ialah melarang pelaku untuk berhubungan dengan orang lain dan melarang masyarakat untuk berhubungan dengan pelaku. Baginda Rasullulah pernah melakukan hukuman pengucilan selama lima puluh lima hari tanpa diajak bicara.<sup>39</sup>

6) Pemecatan (*Al-Azl*)

<sup>39</sup> Ibid., 269-270.

Bahwa tujuan diadakannya hukuman ini adalah agar orang yang bersangkutan menjadi jera dan agar tidak melakukan kejahatan serupa. Bahwa hukuman *At-Tasyhir* ini diumumkan melalui media massa, media cetak maupun media elektronik. *Jarimah* yang bisa dikenakan hukuman ini antara lain: saksi palsu, kerusakan akhlak.<sup>40</sup>

Berikut ini merupakan tujuan dari di berlakukannya sanksi *takzir*,  
yaitu:

- 1). Preventif (pencegahan). Ditujukan bagi orang yang belum melakukan *jarimah*.
- 2). Represif (membuat pelaku jera). Dimaksudkan kepada pelaku untuk tidak mengulangi perbuatan *jarimah* di kemudian hari.
- 3). Kuratif (islah). Sanksi *takzir* harus membawa perbaikan perilaku terpidana di kemudian hari.

[illegible]



terpadu dan juga berwawasan lingkungan. Di samping itu pengelolaan hutan sangat membantu pendapatan dan penerimaan devisa bagi negara dalam rangka mencapai kemakmuran rakyat.<sup>42</sup>

Dapat kita ketahui jenis-jenis pengelolaan hutan dan hasil hutan di kawasan negara dapat dibedakan dari pembagian fungsi hutan masing-masing di setiap kawasan, salah satunya ialah hutan produksi.<sup>43</sup>

Dalam pembagian hutan ini di dasarkan fungsi-fungsinya dengan kriteria dan pertimbangan tertentu, yang mana yang dimaksud hutan produksi merupakan areal hutan yang dipertahankan sebagai kawasan hutan dan berfungsi agar dapat diperoleh hasil hutan bagi kepentingan konsumsi masyarakat industri dan ekspor.<sup>44</sup>

Sepanjang ketentuan hukum yang berlaku bagi pengelolaan terhadap hutan dan hasil hutan maka, di dalam hutan lindung dan di dalam hutan suaka alam dilarang melakukan segala macam bentuk kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan keutuhan kawasan hutan. Untuk menjamin berlangsungnya pemanfaatan hutan secara optimal dan lestari bagi kepentingan pembangunan negara dan kesejahteraan masyarakat yang ditetapkan dengan sistem pelaksanaan pengelolaan hutan. Adanya perbuatan melawan hukum apapun dilarang dalam kawasan hutan negara karena dapat mengakibatkan kerusakan hutan.<sup>45</sup>

<sup>42</sup> Alam Setia Zain, *Hukum Lingkungan Kaidah-Kaidah Pengelolaan Hutan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), 1.

<sup>43</sup> Ibid., 3.

<sup>44</sup> Alam Setia Zain, *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997), 4.

<sup>45</sup> Alam Setia Zain, *Hukum Lingkungan Kaidah-Kaidah Pengelolaan Hutan...*, 3-4.

Persoalan pembalakan liar ini sepertinya sudah menjadi fenomena umum yang ada di mana-mana. Pembalakan liar ini bukan merupakan tindakan yang haram yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, tetapi sudah menjadi pekerjaan keseharian. Fenomena ini bukan merupakan masalah kehutanan saja, melainkan juga persoalan multi pihak yang penyelesaiannya membutuhkan banyak pihak yang terkait. Penegakan hukum terhadap tindak pidana pembalakan liar ini belum dapat dilaksanakan sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Karena di samping keterbatasan dari aparat penegak hukum juga banyaknya aktivitas peredaran kayu tanpa dokumen yang sudah sangat jelas dapat merugikan negara dari segi pendapatan negara maupun dari segi perlindungan hutannya.

Pembalakan liar atau yang biasa disebut illegal logging secara harfiah yaitu illegal yang berarti tidak sah, bertentangan dengan hukum, dan dilarang sedangkan logging yang berarti menebang kayu dan membawa ke tempat penggerajian.

Berdasarkan pengertian harfiah tersebut dapat dikatakan pembalakan liar ialah menebang kayu yang kemudian membawa ke tempat penggerajian yang tidak sah menurut hukum. Istilah pembalakan liar atau ilegal logging ini diidentikkan dengan istilah penebangan kayu ilegal (tidak sah). Gambaran dari pembalakan liar ini menunjukkan adanya suatu kegiatan yang saling terkait mulai dari sumber atau prosedur kayu ilegal yang melakukan



penebangan kayu secara illegal hingga sampai pengguna bahan baku kayu. kayu-kayu tersebut melalui proses pengangkutan yang illegal, penyaringan yang illegal, sampai ekspor atau penjualan kayu yang illegal.

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembalakan liar ialah kegiatan di bidang kehutanan atau merupakan kegiatan yang mencakup penebangan, pengangkutan, pengolahan hingga jual beli kayu yang tidak sah yang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku dan bisa dikatakan perbuatan yang bisa merusak hutan.<sup>46</sup>

Kerusakan hutan akibat penebangan hutan di Indonesia ini sangat tidak terkendali selama puluhan tahun sehingga menyebabkan terjadinya penyusutan hutan tropis secara besar-besaran. Dalam hal ini Negara Indonesia dirugikan yang ditaksir mencapai Rp. 45 triliyun pertahunnya. Setiap tahunnya kerusakan hutan di Indonesia dikarenakan adanya illegal logging yang mencapai 1,6 juta hingga 2,4 juta hektar.<sup>47</sup> Sehingga ini menjadikan Indonesia merupakan salah satu tempat dengan tingkat kerusakan hutan tertinggi di dunia.

Dalam hal pembalakan hutan ini sudah ada prosedur dan tata cara yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang. Seperti pemberian dan pelaksanaan surat keterangan sah nya hasil hutan (SKSHH) apabila

<sup>46</sup> Winarno Budyatmojo, “*Pencegahan Hukum Tindak Pidana Illegal Logging*” Jurnal Hukum, No. 2, Vol. 2 (Mei-Agustus) 2013, 94.

<sup>47</sup> Anis Mashdurohatun dan Bambang Tri Bawono, *Pencegahan Hukum Pidana di Bidang Illegal Logging bagi kelestarian lingkungan hidup dan upaya penganggulangannya* Jurnal Hukum, No. 2, Vol. 26 (Agustus 2011), 591.

Perusakan hutan yang dikarenakan oleh pembalakan liar ini telah menimbulkan kerugian negara, kerusakan lingkungan hidup dan kehidupan sosial budaya serta dapat meningkatkan pemanasan global yang telah menjadi isu nasional dan internasional.

Perusakan hutan sudah menjadi kejahatan yang berdampak luar biasa, dan terorganisasi dengan modus operandi yang canggih yang telah mengancam kelangsungan kehidupan masyarakat sehingga dalam rangka memberikan pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang efektif dan pemberian efek jera juga sangat diperlukan landasan hukum yang kuat dan tentunya mampu menjamin efektivitas penegak hukum.

[illegible]

Perbuatan yang dilarang yang dapat dikategorikan sebagai perusakan hutan ini akibat dari pembalakan liar diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Pasal yang mengatur tentang larangan pembalakan liar ini diantaranya terdapat dalam pasal 12. bunyi pasal tersebut sebagai berikut :<sup>50</sup>

- Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan;
- Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan pejabat berwenang;
- Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah;
- Memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin
- Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan
- Membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang

<sup>50</sup> Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. 9.

Sanksi merupakan salah satu senjata ampuh yang wajib diberikan kepada masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap hukum terutama di bidang kehutanan. Sebab dengan adanya pemberian sanksi inilah masalah kehutanan dapat dicegah dari adanya kegiatan perbuatan merusak dan mengeksploitasi hutan dengan sangat tidak beraturan. Jenis hukuman atau macam ancaman hukuman merujuk dalam pasal 10 KUHP tersebut adalah:

- a. Pidana mati
- b. Pidana penjara
- c. Pidana kurungan



denda paling sedikit Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

3) Korporasi yang :

- a. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf a;
- b. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf b; dan/atau
- c. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf c

Di pidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 5.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).<sup>52</sup>

### C. Pidana Pembalakan Liar dalam Hukum Pidana Islam

## 1. Pengertian pembalakan liar

Dalam Islam, Allah telah menyempurnakan seluruh ciptaan-Nya untuk kepentingan umat manusia demi keberlangsungan hidupnya. Allah telah menciptakan dan menghamparkan bumi untuk memudahkan kehidupan kita. Segala sesuatu yang ada di bumi ini ditumbuhkan dan diciptakan menurut ukuran yang tepat sesuai dengan hikmah., kebutuhan, dan kemaslahatan. Bumi diletakkan ( dihamparkan ) untuk kenyamanan dan kemudahan makhluk-Nya. Yang di dalamnya telah disisipkan bahan-

<sup>52</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, 38.





Menurut Majelis Ulama, masalah pencemaran dan perusakan lingkungan ini belum ditemukan keterangan yang jelas dari ulama terdahulu, karena masalah ini termasuk masalah baru yang timbul di abad modern. Majelis ulama menghadapi masalah ini dengan merujuk kepada ayat-ayat Alquran, yaitu firman Allah dalam Surah Arrum (30) Ayat 41:



ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ

يرجعون (٤١)

Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar.<sup>56</sup>

Kemudian dalam surah Al-Ar'af Ayat 56:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَعْمًا ۖ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ

مِنَ الْمُحْسِنِينَ (٥٦)

Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.<sup>57</sup>

Melihat dari ayat-ayat tersebut di atas dapat kita simpulkan bahwasanya manusia dilarang untuk merusak lingkungan walaupun alam diciptakan untuk kepentingan manusia tetapi tidak diperkenankan menggunakannya secara semena-mena. Agama islam mengandung prinsip-prinsip etika lingkungan yang merupakan sebagian wujud nyata kekuatan moral untuk pelestarian daya dukung lingkungan hidup, sehingga perusakan terhadap lingkungan alam merupakan bentuk dari pengingkaran terhadap keagungan Allah dan dijauhkan dari rahmat-Nya.

<sup>56</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*..., 408.

<sup>57</sup> Ibid., 157.

Dalam masalah kriminal, Islam menempuh dua cara, (1) *Pertama*, menetapkan hukuman berdasarkan nash (Alquran dan hadits). (2) *Kedua*, menyerahkan penetapannya kepada penguasa (ulil amri) untuk menetapkan hukuman yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam Alquran dan sunnah. Hukuman-hukuman tindak pidana yang telah ditetapkan berdasarkan nash ini berlaku sepanjang masa dan tidak berubah karena ruang dan waktu. Jarimah hudud dapat diartikan sebagai dengan jarimah. Adapun pengertian jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syarak yang diancam dengan hukuman had atau takzir. Perbuatan jarimah yang diancam dengan hukuman yang telah ditentukan dalam nash Alquran atau sunnah Rasul dan pasti ancamannya.

Bahwa suatu perbuatan dapat dipandang sebagai jarimah dalam sebuah kenegaraan, jika sesuatu itu dalam bentuk undang-undang. Dengan adanya prinsip tersebut jarimah dan sanksinya dapat diketahui dengan jelas dan pasti. Untuk kasus pembalakan liar ini tidak dijelaskan dalam hukum pidana islam. Islam memberikan kesempatan yang luas kepada ulil amri untuk menetapkan hukumannya. Alquran dan sunnah hanya memberikan ketentuan umum, yang memberikan penjelasannya diserahkan kepada penguasa. Ketentuan umum tersebut ialah bahwa setiap perbuatan yang merugikan, baik terhadap individu maupun masyarakat, merupakan tindak



dipertimbangkan pula daya edukatif dan rehabilitatif bagi yang bersangkutan.<sup>59</sup>

Begitupun dengan Majelis Ulama yang mengatakan bahwa ayat Alquran seperti tersebut di atas tidaklah di rasa cukup dijadikan dasar hukum tentang alam lingkungan. Untuk itu secara praktikal dikembalikan kepada kaidah umum. Hal ini berarti wewenang membuat kebijakan pengaturan, pengendalian, pencegahan, sepenuhnya berada di tangan pemerintah. Karena kebijakan yang telah diterapkan pemerintah pada dasarnya merupakan pedoman dan prinsip syariat, sedangkan syariat itu sendiri ialah kebaikan dan kemaslahatan manusia di dunia maupun di akhirat.<sup>60</sup>

<sup>59</sup> M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah...*, 181.

<sup>60</sup> Ibid., 184.



Dalam kasus tersebut yang mana Terdakwa Suprianto Bin Sumadi oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan alternative sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SUPRIANTO bin SUMADI pada hari Rabu tanggal 2 Mei 2018 sekitar pukul 09.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada bulan Mei 2018, bertempat di jalan umum Ds. Banjardowo, Kecamatan Lengkong, Kabupaten Nganjuk, atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “ dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf e”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

[illegible]

- 80 cm x 15 cm sebanyak 1 batang;
- 70cm x 20 cm sebanyak 1 batang;
- 70 cm x 17 cm sebanyak 1 batang;
- 80 cm x 25 cm sebanyak 1 batang;
- 70 cm x 15 cm sebanyak 1 batang;
- 70 cm x 20 cm sebanyak 2 batang;

Bahwa 7 (tujuh) batang kayu jati dengan volume 0,155 M<sup>3</sup> yang ditaksir seharga Rp.244.500,- (dua ratus empat puluh empat lima ribu lima ratus rupiah).

Kemudian jati tersebut diangkut dengan menggunakan sepeda motor GL Max warna hitam tanpa plat nomor untuk dibawa pulang ke Desa Banggle dengan tujuan untuk dijual namun ketika ditanya mengenai Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) terdakwa tidak dapat

menunjukkan selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Lengkong untuk pengusutan lebih lanjut.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 83 (1) huruf e UURI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

## 2. Dakwaan Kedua

Bahwa terdakwa SUPRIANTO bin SUMADI pada hari Rabu tanggal 2 Mei 2018 sekitar pukul 09.30 WIB atau setidaknya pada bulan Mei 2018, bertempat di jalan umum Ds. Banjardowo, Kecamatan Lengkong, Kabupaten Nganjuk, atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “orang perseorangan yang dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf b, dilakukan perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan”. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 2 Mei 2018 sekitar pukul 06.00 WIB, terdakwa berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor GL Max warna hitam tanpa plat nomor dengan membawa sebilah ganco lalu terdakwa masuk ke dalam hutan yang terletak di wilayah hutan masuk Desa Banjardowo, Kecamatan Lengkon, Kabupaten Nganjuk setelah berada di dalam hutan terdakwa mengambil sisa-sisa kayu hasil tebangan orang, selain itu terdakwa juga memotong/menebang tunggak jati dengan menggunakan



alat kapak dan ganco kemudian kayu jati tersebut dipotong menjadi 7 (tujuh) dengan ukuran sebagai berikut:

- 80 cm x 15 cm sebanyak 1 batang;
- 70cm x 20 cm sebanyak 1 batang;
- 70 cm x 17 cm sebanyak 1 batang;
- 80 cm x 25 cm sebanyak 1 batang;
- 70 cm x 15 cm sebanyak 1 batang;
- 70 cm x 20 cm sebanyak 2 batang;

Bahwa 7 (tujuh) batang kayu jati dengan volume 0,155 M<sup>3</sup> yang ditaksir seharga Rp.244.500,- (dua ratus empat puluh empat lima ribu lima ratus rupiah).

Kemudian jati tersebut diangkut dengan menggunakan sepeda motor GL Max warna hitam tanpa plat nomor untuk dibawa pulang ke Desa Banggle dengan tujuan untuk dijual namun ketika terdakwa sedang melintas di jalan Ds. Sumbersono, Kecamatan Lengkonng dihentikan oleh Petugas dari Polsek Lengkonng dan ketika ditanya mengenai Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) terdakwa tidak dapat menunjukkan selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Lengkonng untuk pengusutan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan keterangan Kepala Desa Banggle, Kecamatan Lengkong, Kabupaten Nganjuk bahwa benar terdakwa bertempat tinggal di Desa Banggle RT.04 RW.01, Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk

### C. Tuntutan Jaksa

Berdasarkan pemaparan kasus di atas, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Suprianto Bin Sumadi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (2) UU RI No. 18 tahun 2013 yang berbunyi : dalam hal tindak pidana sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin dari yang berwenang yang dilakukan oleh perseorangan yang bertempat tinggal di sekitar kawasan hutan, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Oleh sebab itu maka Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUPRIANTO Bin SUMADI** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja menebang pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah yang dilakukan oleh orang yang bertempat tinggal di sekitar kawasan hutan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (2) UU RI No. 18 tahun 2013 dalam dakwaan Alternative yaitu dakwaan kedua.

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor GL Max warna hitam tanpa plat nomor
- Sebilah ganco

- 7 (tujuh) batang kayu jati berbentuk bulat dengan berbagai ukuran diantaranya :

- 80 cm x 15 cm sebanyak 1 batang
- 70cm x 20 cm sebanyak 1 batang
- 70 cm x 17 cm sebanyak 1 batang
- 80 cm x 25 cm sebanyak 1 batang
- 70 cm x 15 cm sebanyak 1 batang
- 70 cm x 20 cm sebanyak 2 batang

Dirampas untuk Negara melalui Perhutani KPH Jombang.

Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar  
Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).<sup>62</sup>

[illegible]

#### D. Keterangan Saksi

Pada saat itu saksi yang bernama Hendrik Eko Santoso bersama-sama dengan anggota Polsek Lengkong sedang melaksanakan patroli kemudian mendapat informasi ada beberapa orang yang tidak dikenal sedang mengangkut kayu jati, selanjutnya saksi melakukan pengecekan dan ternyata benar Sdr. Heri Rudianto Bin Mujiono bersama-sama dengan Suprianto Bin Sumadi sedang mengangkut kayu jati kemudian oleh saksi diberhentikan lalu ditanya tentang kelengkapan Surat dari kayu tersebut namun tidak bisa menunjukkannya, selanjutnya terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Polsek Lengkong

Pada saat itu saksi Dodik Agus Suyono bersama-sama dengan anggota Polsek Lengkong sedang melaksanakan patroli kemudian mendapat informasi ada beberapa orang yang tidak dikenal sedang mengangkut kayu jati, selanjutnya saksi melakukan pengecekan dan ternyata benar Sdr. Heri Rudianto Bin Mujiono bersama-sama dengan Suprianto Bin Sumadi sedang mengangkut kayu jati kemudian oleh saksi diberhentikan lalu ditanya tentang kelengkapan Surat dari kayu tersebut namun tidak bisa menunjukkannya, selanjutnya terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Polsek Lengkong

Saksi Suji Sunar Iskak adalah Kepala Desa Banggle Kecamatan Lengkong, Kabupaten Nganjuk. Bahwa terdakwa sehari-harinya bekerja sebagai Petani dan benar terdakwa tinggal dalam kawasan hutan dan mata pencaharian sebagian besar penduduk Desa Banggle, Kecamatan. Lengkong

Saksi Rudianto pada saat itu bertemu dengan terdakwa di jalan Desa termasuk Desa Banggle lalu saksi bersama-sama dengan terdakwa menuju hutan masuk Desa Banjardowo, Kecamatan. Lengkong, Kabupaten. Nganjuk. Bahwa sebelumnya saksi sudah janji dengan terdakwa bertemu di tempat tersebut dan saksi membawa alat berupa sepeda motor, ganco, kapak, dan tali tampar. Lalu terdakwa dan saksi mencari sisa kayu hasil tebangan orang lain dan tunggak pohon yang telah ditebang oleh orang lain. Pada saat di dalam hutan jarak saksi dengan terdakwa agak jauh terhalang oleh rerimbunan pohon sehingga saksi tidak memperhatikan apa yg dilakukan oleh terdakwa saat itu.<sup>63</sup>

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang telah dihadirkan di dalam persidangan, majelis hakim memutuskan dakwaan jaksa penuntut umum yang kedua yaitu dengan pasal 82 Ayat (2) tentang “dengan sengaja menebang dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang, yang dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di sekitar kawasan hutan, diancam

dengan pidana penjara paling selama 6 (enam) dan denda sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)”

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, terdakwa dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan yang mana unsur-unsurnya ialah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf c yang dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau sekitar kawasan hutan.

Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap Orang” yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 1999 yang telah diubah dengan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2004 tentang Kehutanan yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ialah Subyek Hukum baik orang pribadi (*natuurlijke persoon*), termasuk badan hukum maupun badan usaha (*rechtspersoon*).

Bahwa dari fakta hukum di persidangan, terdakwa yang dihadapkan di muka persidangan adalah Suprianto Bin Sumadi yang mana identitas lengkap telah sama dan sesuai dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan ini, sehingga dengan demikian yang dihadapkan di muka persidangan ini adalah

benar yang dimaksud Penutut Umum dalam surat dakwaannya berdasarkan fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi.

2. Dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf c yang dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau sekitar kawasan hutan

Unsur ini bersifat alternatif, maka jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur ini telah terbukti.

Bahwa yang dimaksud dengan “menebang” adalah perbuatan yang secara nyata dilakukan untuk membuat tumbang atau roboh sebuah pohon dimana di dalam pelaksanaannya membutuhkan bantuan berupa alat

Bahwa yang dimaksud “Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan” adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan awalnya pada hari Rabu tanggal 2 Mei sekitar pukul 09.30 WIB. Berawal dari terdakwa Supriadi Bin Sumadi menuju hutan dengan menggunakan sepeda motor GL MAX warna hitam tanpa plat. Lalu sesampainya di dalam hutan, terdakwa memilih pohon kayu bekas tebangan dari orang lain lalu menebangnya dengan cara memotong setelah roboh kemudian terdakwa memotongnya menjadi 7 (Tujuh) kayu berbentuk gelondong dengan rincian volume 0,155 M<sup>3</sup> dan kemudian diangkut menggunakan sepeda GL MAX



kemudian dibawa pula ke rumah, dan ketika kayu akan dibawa untuk dijual di daerah Sumber Sono, Kec.Lengkong, Kab. Nganjuk terdakwa ditangkap oleh petugas Polsek Lengkong yang sedang melakukan patroli

Berdasarkan Pasal 1 Angka 48 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.55/Menhut-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal dari Hutan Negara maka yang dimaksud dengan “Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan” ialah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penata usahaan hasil hutan.

Berdasarkan ketengan saksi-saksi menurut saksi SUJI SUNAR ISKAK selaku kepala Desa Bangle memberikan keterangan bahwa terdakwa bertempat tinggal di kawasan hutan jati milik Perhutani tempat terdakwa menebang kayu jati tersebut yang berjarak kurang lebih 100 (seratus) meter.

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat semua unsur ke-2 telah dapat terbukti pada diri terdakwa.

Bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari dakwaan alternative kedua dari Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 82 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah dapat dibuktikan oleh Majelis Hakim, maka selanjutnya harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja Menebang Dalam Kawasan Hutan Tanpa Memiliki Izin Dari Pihak Yang berwenang, Yang dilakukan Oleh Orang Perseorangan Yang bertempat Tinggal di Sekitar Kawasan Hutan”



1. Keadaan yang memberatkan :

2. Keadaan yang meringankan :

- a. Terdakwa mengakui dan menyadari perbuatannya
- b. Terdakwa berlaku sopan di persidangan
- c. Terdakwa belum pernah dihukum
- d. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yaitu anak dan istrinya
- e. Terdakwa merupakan warga dari sekitar hutan.<sup>65</sup>

Dasar hukum yang digunakan Majelis Hakim dalam putusan ini adalah Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

<sup>65</sup> Ibid., 18.

1. Menyatakan Terdakwa Suprianto bin Sumadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin dari yang berwenang yang dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di sekitar kawasan hutan”
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).
3. Menetapkan masa penahanan Terdakwa yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Barang bukti yang ditetapkan berupa:
  - a. 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor GL Max warna hitam tanpa plat nomor
  - b. Sebilah ganco

Dirampas untuk dimusnahkan

- [illegible]

- 80 cm x 15 cm sebanyak 1 batang
- 70 cm x 20 cm sebanyak 1 batang
- 70 cm x 17 cm sebanyak 1 batang
- 80 cm x 25 cm sebanyak 1 batang
- 70 cm x 15 cm sebanyak 1 batang
- 70 cm x 20 cm sebanyak 2 batang

Dirampas untuk Negara melalui Perhutani KPH Jombang.

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).<sup>66</sup>

<sup>66</sup> Ibid., 19.

**ANALISIS HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP  
SANKSI TINDAK PIDANA PEMBALAKAN LIAR DALAM PUTUSAN PN  
NGANJUK NOMOR : 149/Pid.B.LH/2018.PN.Njk.**

**Dalam Putusan Nomor : 149/Pid.B.LH/2018/PN.Njk.**

Putusan Hakim yang berkualitas ialah putusan yang didasarkan dengan pertimbangan hukum sesuai fakta yang terungkap di persidangan, yang sesuai Undang-Undang dan keyakinan hakim itu sendiri tanpa terpengaruh siapapun sehingga dapat di pertanggung jawabkan secara profesional kepada publik.

[illegible]

<sup>67</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

- Dan telah memutuskan bahwa terdakwa telah memenuhi semua unsur pada pasal tersebut, maka terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.

[illegible]

2. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim telah menyatakan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
3. Dalam perkara ini terdapat barang bukti berupa 7 (tujuh) kayu jati berbentuk bulat dengan berbagai ukuran yang kemudian di bawa pulang kerumah namun pada saat di jalan terdakwa ditangkap bersama saksi rudianto yang sama-sama tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan.

Kemudian terhadap barang bukti tersebut ahli Agung Prasetya, S.Hut., menerangkan bahwa kayu yang berasal dari hutan dalam hal ini adalah hutan tanaman produksi berupa sortimen kayu bulat sedang dan kayu bulat kecil, kayu bulat, kayu olahan, kayu pacakan. Rincian volume kayu dalam bentuk gelondong adalah 0,155 M<sup>3</sup> dengan nilai ekonomi sebesar Rp. 244.500,- ( dua ratus empat puluh ribu rupiah) bahwa akibat yang dilakukan oleh terdakwa merugikan negara dan negara kehilangan keuntungan dari penjualan kayu tersebut apabila penebangannya tidak memperhatikan kondisi lingkungan maka terjadinya kerusakan lingkungan dan ekosistem.

4. Majelis Hakim juga mempertimbangkan adanya keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagai berikut:
  - a. Keadaan yang memberatkan :
    - 1) Perbuatan terdakwa telah menyebabkan merugikan negara





Apabila putusan kasus pembalakan liar ini dipandang sebagai tindak pidana ringan maka akan dikaitkan dengan asas-asas hukum yaitu asas in dubio pro reo yang berbunyi “jika ada keragu-raguan mengenai sesuatu hal haruslah diputuskan hal-hal yang menguntungkan terdakwa” sesuai Pasal 191 KUHP yang berbunyi, “jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus

[illegible]

Lalu jika putusan ini dilihat dari alat bukti yang merujuk pada pasal 183 KUHP yang berbunyi “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya” Selanjutnya yang

<sup>71</sup> Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor: 149/Pid.B.LH/2018.PN.Njk, 17.

1. Keterangan Saksi
2. Keterangan Ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan Terdakwa<sup>72</sup>

Namun berkaitan dengan pemenuhan minimal dua alat bukti, dalam hukum positif tidak memberikan kewajiban salah satu bukti yang harus digunakan misalnya hanya dengan keterangan saksi. Sepanjang hakim telah mendapatkan keyakinan bahwa benar terjadi suatu tindak pidana, hakim dapat menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tanpa alat bukti keterangan Saksi, tetapi harus memenuhi minimal dua alat bukti lainnya dan dengan keyakinan Hakim. Di dalam Putusan Nomor: 149/Pid.B.LH/2018/PN.Njk ini alat bukti yang di ajukan di persidangan melebihi dari dua alat bukti meliputi keterangan saksi, keterangan terdakwa dan keterangan ahli selanjutnya jika dikaitkan dengan pasal 183 KUHAP penulis berpendapat kurang tepat karena telah memenuhi syarat dua alat bukti sebagaimana yang berbunyi pada pasal tersebut dan di dalam pertimbangan putusan ini, dengan sangat yakin hakim mengacu pada pasal 193 ayat (1) KUHAP yang berbunyi “Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana

[illegible]

Maka asas legalitas pada prinsipnya harus dijadikan pedoman awal bagi hakim untuk mengadili kasus yang sedang ditangani. Maka dalam putusan ini hakim telah melanggar asas legalitas dengan cara tidak menjatuhkan hukuman sesuai dengan Undang-Undang yang ada yakni terdapat dalam pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi :<sup>75</sup>

Suatu perbuatan tidak dapat di pidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada.

Yang dimaksud adalah bahwa ketika hakim memutuskan suatu perkara harus berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Apabila tidak

<sup>74</sup> M. Naufal Filendi, “Asas Legalitas, Kebebasan Hakim Menafsirkan Hukum dan Kaidah *Yurisprudensi*” dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt514810646f40f/asas-legalitas--kebebasan-hakim-menafsirkan-hukum--dan-kaidah-yurisprudensi/>. diakses pada 6 Desember 2019.

[illegible]

sesuai dengan ketentuan Undang-Undang maka hakim sudah melanggar ketentuan. Bahwa dalam hal ini hakim merupakan corong terhadap Undang-Undang yang artinya hakim harus menerapkan hukum yang ada berdasarkan teks Undang-Undang.

Penulis berpendapat bahwa putusan yang diberikan kepada terdakwa di nilai kurang efektif dan kurang adanya ketegasan hukum. Hukuman yang diberikan kepada terdakwa tindak pidana pembalakan liar dirasa begitu ringan karena di bawah ketentuan Undang-Undang, padahal sanksi ringan tidak menjamin terdakwa tidak mengulangi pelanggaran yang sudah terjadi lagi di masa yang akan datang dan pasti akan menyebabkan kerugian materiil maupun non materiil seperti banjir, longsor, dan kerusakan hutan.

Berdasarkan analisa penulis sebagaimana di deskripsi kasus, upaya pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan melalui undang-undang ini dilaksanakan dengan mengedepankan asas keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum di bidang kehutanan menurut Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 juga bertujuan untuk :

1. Memberikan payung hukum yang lebih tegas bagi aparat penegak hukum untuk melakukan pemberantasan perusakan hutan sehingga mampu memberi efek jera bagi pelakunya.
2. Meningkatkan kemampuan dan koordinasi aparat penegak hukum dan pihak-pihak yang terkait melalui lembaga pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan dalam upaya pemberantasan perusakan hutan.

**Pembalakan Liar Dalam Putusan Nomor : 149/Pid.B.LH/2018/PN.Njk.**

Definisi pembalakan liar tidak secara khusus diatur dalam Alquran dan hadis. Namun hal ini dilarang dalam islam karena dalam islam dilarang

[illegible]

membuat kerusakan di muka bumi ini sebagaimana di dalam Alquran surah Al-araf ayat: 56.

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَعْمًا ۖ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ  
مِّنَ الْمُحْسِنِينَ (٥٦)

Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.<sup>77</sup>

Kemudian di dalam surah Arrum ayat: 41.

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ  
يَرْجِعُونَ (٤١)

Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar.<sup>78</sup>

Terlihat di dalam ayat ini telah ditegaskan bahwa ada larangan melakukan perusakan di muka bumi yang dapat mengakibatkan bencana bagi masyarakat yang berdampak buruk bagi kita semua. Oleh karena itu manusia tidak boleh melakukan tindakan yang bisa merusak hutan atau lingkungan yang Allah berikan kepada kita karena akan dapat menimbulkan bahaya bagi kita sendiri.

<sup>77</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan...*, 157.

<sup>78</sup> Ibid., 408.



Dalam hukum pidana islam tidak ada penjelasan yang membahas secara khusus tentang kasus tindak pidana pembalakan liar. Maka perbuatan yang dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan secara luas, masuk kategori sebagai tindak pidana dalam prespektif Hukum Islam dan dapat dikategorikan sebagai *jarimah takzir*.

<sup>79</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah...*, 141.





dilihat dari pekerjaan terdakwa adalah karyawan swasta yang mana sudah mendapatkan pekerjaan yang halal untuk menafkahi keluarga namun terdakwa malah memilih jalan kejahatan yaitu melakukan tindak pidana pembalakan liar ini untuk mendapatkan keuntungan, jelas di dalam islam tidak diperbolehkan menafkahi dengan perbuatan yang membuat masyarakat menjadi khawatir akan kerusakan lingkungan yang terjadi yang bisa mengakibatkan, hutan gundul, banjir, dan tanah longsor, lalu yang terakhir terdakwa merupakan orang yang tinggal di sekitar kawasan hutan, sebenarnya justru terdakwa bertempat tinggal di kawasan hutan harus memberi contoh baik kepada masyarakat serta mendukung program pemerintah untuk menjaga kelestarian lingkungan.

Lalu selanjutnya itu yang harus dipertimbangkan oleh hakim bukan hanya hal-hal yang meringankan saja tetapi juga harus memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan juga efek yang ditimbulkan oleh terdakwa. Bilamana hakim memandang bahwa kejahatan itu menimbulkan efek yang buruk bagi masyarakat maka hakim dapat menjatuhkan sanksi yang berat demi menjaga ketertiban dan keselamatan masyarakat.

Dalam hal ini terdakwa melakukan perbuatan pembalakan liar yang tidak di sertai surat keterangan sah nya hasil hutan jelas keadaan tersebut tidak mematuhi peraturan yang dibuat oleh pemerintah dan adanya Undang-Undang yang berlaku. Perbuatan terdakwa ini sangat meresahkan masyarakat dalam arti terdakwa menjadikan kehidupan masyarakat mengalami ketidaknyamanan yang dapat menyebabkan banjir, longsor, dan hutan gundul. Kejahatan yang

Jika dikaitkan dengan hukum pidana Islam, apabila ada sesuatu yang dapat merugikan negara dan membuat masyarakat tidak nyaman maka harus dijatuhi hukuman pidana. Karena tujuan adanya hukum pidana merupakan untuk melindungi hidup manusia atau dalam Islam disebut dengan *al-maqāṣid-al-syarī'ah khamsah* yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara harta, memelihara keturunan dan memelihara akal.

Oleh karena itu sanksi yang ditetapkan oleh hakim dalam hukum pidana islam yakni berupa sanksi *takzir* yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang salah satunya adalah hukuman kawalan (penjara kurungan) yang mana batas terendah hukuman ini adalah satu hari, sedangkan yang tertinggi menurut pendapat berbagai ulama menetapkan batas tertingginya adalah satu tahun, karena mereka mempersamakannya dengan pengasingan dalam jarimah zina dan juga hukuman takzir yang berkaitan dengan harta.

[illegible]

Ditinjau dari hukum pidana dalam penjatuhan hukuman dalam putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor : 149/Pid.B.LH/2018/PN.Njk yang memberikan hukuman berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ini tidak sesuai dengan konsep *takzir*, karena hakim telah melanggar batas minimum denda dari pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 yang seharusnya pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).<sup>80</sup>

<sup>80</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

## 2. Represif

### 3. Kuratif

#### 4. Edukatif

Mengingat tindakan pembalakan liar terus terjadi dan bisa menjadi kebiasaan apabila penegak hukum tidak bertindak secara maksimal dalam menerapkan hukuman.

[illegible]

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Majelis Hakim memutuskan perkara dalam putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor : 149/Pid.B.LH/2018/PN.Njk tentang tindak pidana pembalakan liar ini terlebih dahulu mempertimbangkan tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut terdakwa dengan pasal 82 ayat (1) dan 82 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, setelah diteliti lebih lanjut, unsur keseluruhan ada pada dakwaan kedua yakni pasal 82 ayat (2). Selanjutnya Majelis Hakim memutuskan terdakwa dengan dakwaan alternatif kedua dari penuntut umum yaitu melanggar pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Yakni menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Dalam hal ini majelis hakim memutuskan pidana denda yang melanggar ketentuan batas minimum Undang-Undang, yang seharusnya denda minimal Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Padahal dilihat dari fakta hukum yang ada tidak ditemukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan pemaaf

maupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan pidana. Maka menurut majelis hakim unsur-unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Hakim juga sudah mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan terdakwa.

2. Berdasarkan Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap sanksi tindak pidana pembalakan liar yang dilakukan oleh terdakwa Suprianto Bin Sumadi ini termasuk dalam kategori *jarimah takzir* yakni berupa ganti rugi/denda dikarenakan tidak ada ketentuan nash yang mengatur secara rinci bagi hukuman tindak pidana pembalakan liar. Hukuman yang diancamkan kepada seseorang yang melakukan jarimah agar tidak mengulangi tindak kejahatan lagi, juga diharapkan dapat memberikan pelajaran kepada orang lain agar tidak melakukan jarimah. Terhadap sanksi hukuman yang diberikan kepada terdakwa Suprianto Bin Sumadi dalam kasus pembalakan liar pada Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 149.Pid.B.LH/2018/PN.Njk terdakwa dihukum pidana penjara 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp.2500.000,00 (dua ratus ribu rupiah). walaupun dalam syariat islam tidak menetapkan batas tertinggi dan terendah dari suatu hukuman pidana penjara dan pidana denda sehingga kewenangan penjatuan hukuman sepenuhnya diserahkan kepada *ulil amri* atau hakim dengan mempertimbangkan berat ringannya jarimah yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana jarimah dan agar terdakwa tidak melakukan kejahatan kembali

dan memberi pelajaran kepada seluruh masyarakat untuk tidak melakukan *jarimah*.

## **B. Saran**

Uraian dan kesimpulan yang penulis paparkan di atas, penulis dapat memberikan saran dan masukan sebagai khazanah keilmuan dan dapat dijadikan pertimbangan konstruktif bagi dunia hukum dan akademika. Sebagai berikut :

1. Untuk para penegak hukum terutama hakim sebaiknya dalam mempertimbangkan suatu perkara diharapkan agar lebih bijaksana dan kritis sehingga sanksi yang diberikan kepada terdakwa benar- benar adil karena hukum sebagai pijakan utama dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara.
2. Kepada calon-calon hakim mendatang diharapkan dapat mengikuti lembaga pendidikan khusus untuk hakim dengan serius dan diharapkan bisa meningkatkan pengetahuan, kompetensi, dan keahlian hakim yang profesional.
3. Kepada masyarakat tentunya agar senantiasa menjaga dan tidak merusak lingkungan kawasan hutan sebagai anugerah yang telah Allah berikan. Karena hutan merupakan sumber kehidupan. Dengan menjaga hutan berarti sama halnya menjaga kehidupan untuk masa depan.



4. Pemerintah perlu mengadakan sosialisasi kepada masyarakat dan pengusaha yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya hutan tentang pentingnya menjaga lingkungan dan tidak mengeksploitasi kekayaan alam secara berlebihan. Yang dapat membawa dampak bagi lingkungan.





Ghoni, Muhammad Abdul. *“Sanksi Terhadap Illegal Logging di Kecamatan Kedung Adem Kabupaten Bojonegoro Menurut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No.4 Tahun 2013 Dalam Prespektif Fikih Jinayah”*. Skripsi, Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2013.

Hasan, Mustofa dan Beni Saebani. *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah) dengan Kajian Hukum Pidana Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.

Husain, Muhammad Zubair. “*Pembuktian Tindak Pidana Penebangan Liar (Illegal Logging) oleh Penuntut Umum (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Jeneponto)*”. Skripsi. Makassar: UIN Alauddin, 2012.

Indriyanto, *Pengantar Budi Daya Hutan*. Jakarta : PT Bumi Aksara, 2010.

Irfan, M.Nurul dan Masyrofah. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah, 2013.

[illegible]

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Acara Hukum  
Pidana.

Mashdurohatun, Anis dan Bambang Tri Bawono. *“Penegakan Hukum Pidana di Bidang Illegal Logging bagi kelestarian lingkungan hidup dan upaya penganggulannya”*. Jurnal Hukum. Vol. 26 No. 2 tahun 2011.

Munajat, Makhrus. *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004.

Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

-----, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*. Jakarta : Sinar Grafika, 2014.

Nazia, Zahrotun. “Kajian Yuridis Mengenai Illegal Logging di Kawasan Hutan (Study Kasus Illegal Logging di Balai Taman Nasional Meru Betiri Kabupaten Jember)”. Skripsi. Jember: Universitas Jember, 2013.

Nisa', Laila Nurin. *"Implementasi Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2009 Tentang Penebangan Kayu Rakyat Dan Tata Usaha Kayu Rakyat Di Kabupaten Mojokerto"*. Skripsi. Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2017.

Pamulardi, Bambang. *Hukum Kehutanan dan Pembangunan Bidang Kehutanan*.  
Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1996.

Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor: 149/Pid.B.LH/2018/PN.Njk.

Redi, Ahmad. *Hukum Sumber Daya Alam Dalam Sektor Kehutanan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Rusli, “*Tinjauan hukum pidana islam dan hukum positif terhadap tindak pidana pengebangan pohon secara liar : Studi Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor : 53/Pid.Sus/2015/PN.Bkl*.” Skripsi. Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2018.

- Rusli, “*Tinjauan Yuridis Persamaan Dan Perbedaan Sanksi Pidana Antara Hukum Pidana Islam Dengan Hukum Pidana Indonesia*”. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion. Vol. 2 tahun 2014.
- Saebani, Ahmad Beni dan Mustofa Hasan. *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah) dengan Kajian Hukum Pidana Islam*. Bandung : Pustaka Setia, 2013.
- Saputra, Fathin Teguh Saputra. *Penerapan Hukum Pidana Serta Fiqih Lingkungan Terhadap Pelaku Penebangan Liar Yang Bermukim Di Sekitar Kawasan Hutan Milik Negara*. Skripsi. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2017.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah, Vol. 10*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Sunggono, Bambang. *Metodelogi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Supriadi, *Hukum Kehutanan & Hukum Perkebunan Di Indonesia*. Jakarta: PT Sinar Grafika, 2010.
- Surakhmad, Wirano. *Pengantar Penelitian: Dasar, Metode, Tehnik*, cet 7. Bandung, 1994.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
- Yalie, Alie. *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*. Jakarta: UFUK PRESS, 2006.
- Zain, Alam Setia. *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997.
- , *Hukum Lingkungan Kaidah-Kaidah Pengelolaan Hutan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995.